
Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara

INFO PENULIS INFO ARTIKEL

Risman Togala ISSN: 2963-8933
Universitas Sulawesi Tenggara Vol. 3, No. 1, Februari 2024
okrisman23@gmail.com <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

Erfain
Universitas Sulawesi Tenggara
Erfain454@gmail.com

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Togala, R., & Erfain. (2024). Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 3 (1), 12-20.

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah: Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Andowia? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan faktor-faktor apakah yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Kecamatan Andowia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana informan penelitiannya adalah beberapa Kepala Desa Lambudoni beserta staf dan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, kuesioner dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif. Melalui penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Masyarakat telah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia, namun yang terlihat hanya sebagian kaum perempuan yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatannya tersebut. artinya pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan belum optimal, karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dan menghambat realisasi pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia adalah kurangnya informasi kepada masyarakat, kesibukan mencari nafkah dan kemampuan ekonomi untuk mengakses bantuan yang diberikan.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Program, Pemberdayaan Perempuan

Abstract

The problem of this research is: What is the level of community participation in implementing women's empowerment programs and what factors encourage and inhibit community participation in implementing women's empowerment programs in Andowia District? The aim of this research is to determine and describe the level of community participation in implementing women's empowerment programs and what factors encourage and inhibit community participation in implementing women's empowerment programs in Andowia District. This research is qualitative research where the research informants are several Lambudoni Village Heads along with staff and the community. Data collection was carried out by means of observation, questionnaires and interviews. The collected data was then analyzed descriptively qualitatively. Through this research, the researcher concluded that the community had participated in women's empowerment activities in Lambudoni Village, Andowia District, but only a few women were seen who were active and participated in these activities. This means that achieving the goals of the women's empowerment program is not optimal, because there are various factors that influence and hinder the realization of achieving the goals of the women's empowerment program in Lambudoni Village, Andowia District. Factors that hinder the implementation of women's empowerment program activities in Lambudoni Village, Andowia District are lack of information to the community, busyness in earning a living and the economic ability to access the assistance provided.

Keywords: Community Participation, Program, Women's Empowerment

A. Pendahuluan

Perempuan Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang seharusnya mendapatkan hak dan mempunyai kewajiban yang sama. Jika di satu pihak kita melihat kewajiban perempuan Indonesia sangat besar dan kompleks, tetapi di pihak lain tampaknya tidak diiringi dengan perlindungan hak yang sama. Masih banyak perempuan yang mempunyai kemampuan yang jauh lebih rendah dari laki-laki sehingga kontribusi mereka dalam pemberdayaan perempuan menjadi terbatas.

Kebijaksanaan pemberdayaan perempuan yang selama ini berlaku, di pandang dari aspek pemberdayaan perempuan belum memperhatikan isu-isu gender yang berkembang. Pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) seharusnya diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan, disebabkan ketidak mengertian para pengambil keputusan maupun pelaksana di tingkat sektoral dan di tingkat masyarakat. Ketidak tahuan dan kurang sadarnya maupun ketidak pedulian akan adanya isu gender sebagai salah satu potensi sumber daya sehingga *gender mainstreaming* dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan hanya diintegrasikan pada berbagai sektor yang mengakibatkan kerugian bagi kalangan perempuan.

Implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Konawe Utara telah dilakukan melalui berbagai kegiatan melalui unit instansi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Hasil pengamatan sementara di lapangan, menunjukkan bahwa beberapa kelompok usaha kecil perempuan yang tersebar di beberapa kelurahan dalam wilayah Kabupaten Konawe Utara telah mendapat bantuan pembinaan dan pemberdayaan usaha dari pemerintah Kabupaten Konawe Utara, melalui dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Konawe Utara.

Pada saat ini terdapat kurang lebih sekitar 40 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang dikelola oleh perempuan, bergerak dalam bidang industri kecil rumah tanggap seperti pembuatan keripik pisang, abon ikan, kue basah dan kering, dan kelompok perempuan yang bergerak dalam usaha pengeringan ikan. Keseluruhan kelompok ini dalam pembinaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Konawe Utara. konsep pembinaan yang dilakukan adalah peningkatan keterampilan usaha, peningkatan kualitas produksi, pemasaran dan bantuan modal usaha.

Pemberian bantuan dan pembinaan kepada kelompok usaha kecil perempuan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha kelompok melalui pemberian tambahan modal usaha dan pelatihan tentang cara-dan strategi pengembangan usaha.

Kenyataannya, sampai saat ini kelompok usaha perempuan yang menjadi binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Konawe Utara, sangat sedikit yang mampu mengembangkan usahanya.

Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti bermaksud melakukan pengkajian tentang persepsi kelompok sasaran dari program tersebut, untuk mengetahui sejauh mana manfaat program kebijaksanaan itu dalam proses pemberdayaan perempuan, khususnya peningkatan kualitas hidup kaum perempuan yang bergerak di bidang usaha kecil.

Mempelajari masalah implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk memahami apa kenyataan yang terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan negara, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat atau peristiwa-peristiwa.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijaksanaan negara diwujudkan secara "out come" (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterkaitan antara perencanaan dan implementasi tak dapat diabaikan. Proses perencanaan itu sendiri tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang terpisah dari pelaksanaan. Pada tahap implementasi berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendorong maupun penghambat pelaksanaan program.

Faktor-faktor pendorong, adalah: 1) Dukungan pimpinan politik; 2) Komitmen yang tinggi di kalangan pelaksana; 3) Kemampuan organisasi pelaksana; dan 4) Dukungan yang kuat dari masyarakat;

Faktor penghambat dapat dikemukakan, sebagai berikut: 1) Banyaknya pelaku yang terlibat; 2) Terdapatnya loyalitas ganda; 3) Tingkat kerumitan yang melekat pada program itu sendiri; 4) Jenjang pengambilan keputusan yang berbelit-belit; dan 5) Waktu dan perubahan.

Konsep Pemberdayaan Perempuan

Secara global di sadari bahwa setiap kebijaksanaan dan strategi dalam pemberdayaan perempuan tidak selalu akan memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap pria dan wanita upaya untuk mewujudkan kondisi normatif, di mana pria dan wanita mempunyai persamaan kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab dan peranan serta kesempatan dalam berbagai bidang kehidupan dan segenap kegiatan dalam pemberdayaan perempuan, tidak mungkin dapat diwujudkan apabila penanganannya hanya ditujukan terhadap perempuan saja tanpa memperhatikan masalah hubungan pria dan wanita (*gender relation ship*).

Di bidang pendidikan, rendahnya kualitas perempuan dapat dilihat dari terjadinya ketidaksetaraan dalam tingkat pendidikan perempuan dibanding laki-laki. Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dalam bentuk perbedaan akses dan peluang antara laki-laki dan perempuan terhadap kesempatan memperoleh pendidikan. Dalam hal kesetaraan dan keadilan gender, tampak bahwa belum sepenuhnya dapat diwujudkan, karena masih kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang patriarki. Nilai-nilai ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara.

Belum terwujudnya, kesetaraan dan keadilan gender ini diperburuk oleh masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Yang dimaksud dengan kebijakan publik di sini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif termasuk TNI dan Polri. Selain terbatasnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan, kebijakan publik yang tidak peka gender juga dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran gender di kalangan para pengambil keputusan serta tidak lengkapnya data dan informasi gender.

Di bidang lapangan kerja, ketidakadilan dan kesetaraan gender juga masih tampak jelas sebagai akibat rendahnya pendidikan dan derajat kesehatan perempuan, seperti yang telah diuraikan diatas. Hal ini ditunjukkan oleh masih rendahnya peluang yang dimiliki perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses mereka terhadap sumberdaya ekonomi, seperti teknologi, informasi, pasar, kredit dan modal kerja.

Permasalahan mendasar lainnya yang masih terjadi sampai saat ini berkaitan dengan diskriminasi perlakuan yang diterima oleh kaum perempuan dalam dunia kerja. Kenyataan di masyarakat menunjukkan masih terjadinya perbedaan perlakuan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, terutama mereka yang bekerja di sektor formal. Kaum perempuan di sektor formal masih banyak yang mendapatkan perlakuan yang berbeda antara lain perbedaan gaji, perbedaan proses seleksi dan promosi yang dikaitkan dengan status perkawinan pekerja perempuan.

1. Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender

Secara statistik disajikan data ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang profesi dan pekerjaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh citra baku (*stereotype*) dalam pandangan masyarakat yang menempatkan perempuan lebih banyak berperan dalam sektor domestik (rumah tangga) dan laki-laki bekerja di sektor publik yang produktif untuk menopang ekonomi kehidupan rumah tangga.

2. Pendekatan Gender dalam Pemberdayaan perempuan

Berbagai analisis dan indikator menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan yang berkepanjangan antara perempuan dan laki-laki akan membatasi produktivitas dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan Bangsa Indonesia. Oleh karena masih adanya kesenjangan tersebut, kesenjangan kedudukan, hak, kemampuan dan peranan antara perempuan dan laki-laki maka ditegaskan bahwa penyusunan perencanaan dan program pemberdayaan perempuan dilandaskan pada penggunaan wawasan dan pendekatan gender yaitu wawasan dan pendekatan yang berdasarkan pada konsep Kemitra sejajar wanita dan pria. Disamping itu ditegaskan pula masih perlunya dilanjutkan program dengan pendekatan khusus perempuan (*Women Specific Program*).

3. Perencanaan pembangunan yang responsif pada gender

Pendekatan dalam perencanaan sering juga disebut sebagai perencanaan yang Responsif Gender adalah proses perencanaan yang didasarkan pada identifikasi yang konsisten dan sistematis terhadap adanya perbedaan, ketimpangan antara perempuan dan laki-laki yang dimaksudkan ditujukan untuk mengatasi atau mengurangi/menghilangkan kendala atau masalah yang ada sehingga memungkinkan adanya peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh sumber daya dan menikmati hasil dari sumber daya tersebut.

Pengkajian dan penelitian yang akan dilakukan untuk menelaah permasalahan dimaksud dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui Partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang pendorong dan penghambat dalam program pemberdayaan perempuan di Desa Labudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara.

B. Metodologi

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian adalah melalui studi kasus (*case studi*), sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang dilakukan untuk mengamati, menilai dan mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia dan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia.

Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia Kabupaten Konawe Utara. Situs penelitiannya adalah beberapa kelompok usaha perempuan yang berdomisili di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia.

Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada pemberdayaan kelompok perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia yang telah mendapat bantuan dan selanjutnya mengkaji tentang tatacara kelola dan evaluasi hasil kegiatan pengelolaannya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a) Kuesioner; b) Wawancara; dan c) Dokumentasi; mengumpulkan data dengan menelaah data-data yang telah didokumentasikan oleh instansi terkait.

Teknik Analisis Data

Data yang telah disajikan dalam bentuk tabel selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan membuat penjelasan secara deskriptif untuk menjelaskan secara utuh tentang materi yang menjadi pembahasan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Letak dan Luas Wilayah

Letak dan luas wilayah Desa Lambudoni Kecamatan Andowia adalah sebagai berikut: Desa Lambudoni Kecamatan Andowia terletak di sebelah Selatan Ibukota Kecamatan Andowia yang berjarak sekitar 1 Km. adapun batas-batas wilayahnya, adalah: sebelah Utara berbatas dengan Desa Lambusa, sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Moramo Utara, sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Wolasi, dan sebelah Barat berbatas dengan Desa Lawoila. Luas wilayah Desa Lambudoni 3,54 Km² (354 Ha) yang terdiri dari lahan peruntukan sawah dan perkebunan seluas 200 Ha dan lahan untuk peruntukan lain (fasilitas umum dan perumahan/permukiman) seluas 154 Ha.

Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap kemampuan wawasan dan berpikir, termasuk di dalamnya adalah kemampuan untuk melakukan peningkatan produktivitas usaha tani berdasarkan mata pencaharian yang dimiliki penduduk Desa Lambudoni Kecamatan Andowia mempunyai sebaran tingkat pendidikan dari belum/tidak pernah sekolah, SD/tamat SD, SLTP/tamat SLTP, SLTA/tamat SLTA, dan klasifikasi Perguruan tinggi yang terdiri dari Pendidikan Diploma, Sarjana Muda dan Sarjana. Sebaran tingkat pendidikan yang belum sekolah, SD/ sederajat (tidak tamat) merupakan porsi terbesar yang ada dalam penduduk Desa Lambudoni yaitu sebesar 36,35% kemudian disusul oleh tingkat pendidikan yang tamat SD/ sederajat yaitu sebesar 25,58% sedangkan porsi yang terkecil adalah kelompok penduduk yang sampai saat penelitian ini dilakukan berstatus buta aksara yaitu 3,31%. Gambaran tabel tersebut juga menunjukkan bahwa di Desa Lambudoni masih terdapat penduduk yang buta aksara walaupun jumlahnya relatif kecil.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian dari 224 Kepala Keluarga (KK) penduduk Desa Lambudoni sebagian besar adalah petani, baik sebagai petani sawah maupun berkebun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Mata pencaharian lain yang terdapat di Desa Lambudoni ialah Pedagang (kios semabako), Pegawai Negeri/Guru, Pensiunan (PNS, TNI/Polri) dan kegiatan wirausaha (industri rumah tangga). 81,25% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk Desa Lambudoni bermata pencaharian sebagai petani yang merupakan kelompok terbesar, sedangkan kelompok terkecil adalah Kepala Keluarga yang bermata pencaharian sebagai PNS/guru yaitu hanya 3,57% dan usaha jasa industri rumah tangga yaitu hanya mencapai 3,13% dari jumlah Kepala Keluarga penduduk desa Lambudoni.

Luas lahan

Luas lahan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia pada saat penelitian dilakukan adalah 354 Ha. Lahan peruntukan sawah/ perkebunan adalah seluas 200 Ha (172 Ha telah ditanami dan diolah), lahan peruntukan perumahan dan permukiman penduduk 137 Ha (101 Ha telah dipergunakan oleh masyarakat), sedangkan untuk fasilitas umum seluas 17 Ha (15 Ha telah dimanfaatkan dan hanya 2 Ha masih tersisa).

Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia

Pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia, khususnya dalam rangka meningkatkan ekonomi rumah tangga, seperti pembuatan kripik pisang, penanaman sayur mayur di pekarangan atau halaman untuk kebutuhan keluarga, pembuatan anyaman rotan dan kegiatan. Kesemuanya ditujukan bagi kaum perempuan di Desa lambudoni agar dapat membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tanpa meninggalkan tugas-tugas utamanya sebagai ibu rumah tangga. Berikut dijelaskan bentuk partisipasi masyarakat Desa Lambudoni secara umum dalam berbagi kegiatan yang dilakukan untuk mendukung suksesnya kegiatan pemberdayaan perempuan, seperti kegiatan perbaikan pagar dan pengadaan lahan usahatani, dan sarana prasarana usaha.

Partisipasi/bantuan tenaga

Tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Andowia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam bentuk bantuan tenaga atau partisipasi bekerja gotong royong sebagai hasil perumusan dalam rapat perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan menunjukkan tingkat yang rendah. Hasil pengamatan menunjukkan hanya pada hari Jum'at masyarakat banyak yang ikut kerja bakti, sedangkan kegiatan lain biasanya masyarakat hanya menyumbang. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan Kecamatan Andowia baik dalam bentuk tenaga dikemukakan dalam tabel.

Tabel.1 Partisipasi/bantuan tenaga masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan

Jawaban responden	Frekuensi	Persentase
Setiap ada kegiatan	8	40,00
Kadang-kadang/sekali-sekali saja	10	50,00
Tidak membantu	2	10,00
Jumlah	20	100,00

Sumber : Hasil isian angket (diolah), 2023.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa 40,00% partisipasi responden yang bewujud bantuan tenaga atau bekerjasama dengan masyarakat lain secara gotong royong dalam kegiatan pemberdayaan perempuan dilakukan setiap ada kegiatan. 50,00% responden menyatakan hanya kadangkadang/sekali-sekali saja ikut berpartisipasi atau membantu tenaga dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, 10,00% menyatakan tidak pernah ikut berpartisipasi atau membantu tenaga dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Data pada tabel di atas memberikan gambaran bahwa walaupun tingkat partisipasi dalam perencanaan pemberdayaan perempuan baik yang berbentuk ikut rapat maupun memberi saran berada pada kategori rendah, namun setelah diputuskan sebagai wujud kegiatan pemberdayaan perempuan, maka responden atau masyarakat secara antusias ikut serta berpartisipasi membantu secara gotong royong dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Partisipasi/bantuan materi/dana/peralatan

Sumbangan dalam bentuk materi/dana yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia dapat berwujud uang, atau barang yang berupa alat atau bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sebagaimana dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel. 2 Partisipasi/bantuan materi/dana masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berupa Uang	0	0,00
2	Berupa bahan makanan	7	35,00
3	Berupa peralatan	13	65,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber : Hasil isian angket (diolah), 2020.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau sebanyak 35,00% berpartisipasi/bantuan dalam bentuk sumbangan yang berwujud bahan makanan serta bahan lainnya pada kegiatan pemberdayaan perempuan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 65,00% memberikan partisipasi/bantuan dalam bentuk peralatan seperti peralatan masak atau alat-alat kerja untuk menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan. Data di atas menunjukkan bahwa partisipasi/ bantuan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan lebih banyak yang berwujud peralatan kerja. Hal ini tentu didasari pada alasan bahwa ketersediaan peralatan adalah untuk mendukung sepenuhnya penyediaan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pemberdayaan perempuan termasuk penyiapan bahan makanan bagi masyarakat yang ikut bekerja.

Data tentang partisipasi bantuan responden dalam kegiatan pemberdayaan perempuan memberikan gambaran bahwa masyarakat Desa Lambudoni Kecamatan Andowia lebih banyak

yang tidak terlibat secara langsung dalam proses kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut, tetapi menyerahkannya kepada pemerintah Desa Lambudoni Kecamatan Andowia, untuk mengurus dan mengelola sendiri setiap rencana kegiatan pemberdayaan perempuan yang telah ditetapkan dalam rapat perumusan rencana pemberdayaan perempuan.

Menurut pernyataan Kepala Desa Lambudoni Kecamatan Andowia tentang tingkat partisipasi masyarakat Kecamatan Andowia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai berikut:

“masyarakat banyak yang lebih baik menyumbang daripada kerja, karena mereka katanya sibuk cari hidup atau tidak bisa meninggalkan kegiatannya” (wawancara, Juni, 2020).

Sejalan dengan pernyataan di atas, Camat Andowia memberikan pernyataan sebagai berikut:

“pemerintah sebenarnya berposisi sebagai fasilitator dalam pemberdayaan perempuan, subjek utamanya adalah masyarakat, namun karena aktifitas masing-masing individu warga masyarakat, menyebabkan biasanya mereka tidak bisa ikut secara langsung, tetapi kalau sudah menyumbang itu namanya ikut juga membantu kesuksesan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan” (wawancara, Juni 2020).

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan seperti pengadaan peralatan untuk pembuatan kripik pisang, pembuatan pagar, pengolahan lahan dan pengadaan bibit untuk kebun sayur, dari masyarakat terkumpul dana partisipasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Sumber: dokumentasi kantor Desa Lambudoni Kecamatan Andowia, 2020).

Berdasarkan ungkapan data di atas dapat dinyatakan bahwa partisipasi masyarakat Desa Lambudoni Kecamatan Andowia dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan lebih berorientasi pada sumbangan dana, sedangkan yang terlibat langsung bekerja secara fisik, jumlahnya relatif kecil. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa kepedulian masyarakat terhadap seluruh aktifitas kegiatan pemberdayaan perempuan sangat minim karena mereka lebih mementingkan kebutuhan pribadi yang bersifat individu. Hal ini disebabkan karena desakan kebutuhan hidup, namun tidaklah berarti karena desakan kebutuhan hidup tersebut sehingga mereka mengabaikan partisipasinya terhadap upaya pemberdayaan perempuan di kampung, melainkan diwujudkan dalam bentuk sumbangan dana sukarela untuk kepentingan masyarakat umum.

Proses Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia

Berdasarkan uraian tentang partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan terungkap bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan rapat merencanakan kegiatan untuk pemberdayaan perempuan dan memberikan saran terhadap rencana kegiatan pemberdayaan perempuan, kategori partisipasi masyarakat rendah. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa fase perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kurang terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hal ini terungkap dari pernyataan informan sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) terdapat 3 (tiga) aspek pelaksanaan, yaitu aspek perencanaan, perumusan, dan realisasi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan. Aspek perencanaan adalah kegiatan pembuatan rancangan dan konsep kegiatan pemberdayaan perempuan rencana kerja kelompok, orientasi pelatihan dan orientasi ekonomi. Namun waktu dibuat perencanaannya, masyarakat yang hadir sangat kurang. Jadi kita putus saja nanti disampaikan hasilnya kepada masyarakat luas” (wawancara Juni, 2020).

Keterangan responden tersebut, relevan dengan penjelasan yang dikemukakan oleh Kepala Desa Lambudoni bahwa pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bidang perencanaan Pemberdayaan perempuan Sebagai berikut:

“Terdapat beberapa perencanaan yang telah dilaksanakan yaitu pemberdayaan perempuan seperti pembuatan kripik pisang, tanaman sayur mayur dan kebun tanaman obat, dan ada juga yang belum dapat dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), namun hal tersebut bukan karena adanya hambatan

melainkan karena adanya kebutuhan terhadap beberapa program yang mendesak untuk didahulukan seperti tersebut di atas” (Wawancara, Juni, 2020).

Data di atas memberikan gambaran bahwa pelaksanaan tugas-tugas perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan yang direncanakan oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berjalan dengan baik dan memperhitungkan aspek swadaya masyarakat, walaupun masih terdapat beberapa konsep perencanaan yang belum dapat diteruskan ke dalam perumusan program. Hal ini disebabkan karena minimnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat dan memberikan saran/ide dan tanggapan terhadap setiap usulan perencanaan.

Konsep atau rancangan yang telah dihasilkan dalam kegiatan usulan perencanaan kegiatan pemberdayaan perempuan selanjutnya dibahas/ dirumuskan dan dinilai untuk selanjutnya dijadikan sebagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama seluruh masyarakat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan.

Faktor-faktor yang Mendorong dan Menghambat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan

Beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai penghambat dalam merangsang partisipasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan Pemberdayaan perempuan adalah : 1) kurangnya informasi, 2) rendahnya tingkat pendidikan, dan 3) kemiskinan.

- Kurangnya Informasi

Dalam penelitian ini adalah kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi mengenai pembentukan organisasi pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia secara tepat, tidak dilakukannya sosialisasi mengenai keberadaan dan kegiatan dari organisasi Pemberdayaan perempuan .

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa salah satu penyebab sehingga belum seluruhnya masyarakat berpartisipasi dan mendukung kegiatan pemberdayaan perempuan disebabkan karena ketidak tahuan dan tidak memperoleh informasi yang tepat mengenai organisasi tersebut, dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah mengenai hal tersebut.

- Rendahnya pendidikan

Faktor lain yang menghambat partisipasi anggota dan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan adalah karena rendahnya kemampuan pemahaman (tingkat pendidikan) para warga masyarakat, sehingga dalam memahami maksud dan tujuan suatu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan menjadi rendah. Selain itu kemampuan ekonomi juga menjadi penghambat dalam berpartisipasi, karena dengan tingkat ekonomi yang rendah/miskin, maka anggota atau masyarakat tidak dapat memberikan partisipasi/sumbangan dalam bentuk barang/materi atau uang.

- Faktor sosial ekonomi (kemiskinan)

Kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung menyebabkan aktifitas masyarakat dalam mencari kehidupan baik sebagai petani kadangkala berlangsung tanpa batas waktu, maksudnya ialah masyarakat yang bertani kadangkala bertahan untuk tinggal di kebun masing-masing menunggu dan merawat tanamannya, sehingga aktifitas yang berlangsung di dalam kampung, terabaikan atau tidak diikuti seluruhnya termasuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan . Hal ini juga terjadi pada sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai pedagang atau petani sehingga pada siang hari mereka tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan .

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kesimpulan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat telah berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia, namun yang terlihat hanya sebagian kaum perempuan yang aktif dan berpartisipasi dalam kegiatannya tersebut. artinya pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan belum optimal., karena terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dan menghambat realisasi pencapaian tujuan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia.
2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan perempuan di Desa Lambudoni Kecamatan Andowia adalah kurangnya informasi kepada masyarakat, kesibukan mencari nafkah dan kemampuan ekonomi untuk mengakses bantuan yang diberikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemerintah Desa Lambudoni Kecamatan Andowia bersama tokoh masyarakat meningkatkan frekuensi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan untuk aktif dalam kegiatan ekonomi. Hal ini dimaksudkan agar partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan semakin tinggi.
2. Diharapkan agar pemerintah dan tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dalam kegiatan pemberdayaan perempuan, sehingga tujuan dan arah yang akan dicapai tetap terfokus sesuai sasaran dan tujuan kegiatan pemberdayaan perempuan..

E. Referensi

- Abdullah, H. M. S. (1987). *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action research and case studies), Makalah Pada "Temu Kaji Nasional Persadi Pusat"* di Ujung Pandang.
- (1988). *Perkembangan dan Penerapan Studi Pelaksanaan (Action research and case studies), Makalah Pada "Temu Kaji Nasional Persadi Pusat"* di Ujung Pandang.
- Chaplin, C.P. (1993). *Kamus Psikologi (Terjh. Kartini Kartono)*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Dunn, W. N. (1981). *An Introduction Public Policy Analysis*, Englerword Cliff Prentice Hall.
- Grindlle, M. S. (1980). *Politics And Policy Implemetation The Third*, Princeton Hall University Press.
- Idrus, M. M. (1992). *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan perempuan Desa*, Laporan Penelitian, UNHALU - Kendari.
- Instruksi Presiden Nomor. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
- Kantor Meneg-PP. (2001). *Panduan pelaksanaan Inpres Nomor. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pemberdayaan perempuan* , Kantor Meneg-PP, Jakarta.
- Mustopadidjaya, A. R. (1994). *Analisis Kebijakan dan Perencanaan pemberdayaan perempuan* , Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa, Fisipol Unhas, Ujung Pandang.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Rakhmat, J. (1989). *Keluarga Sakinah, Suatu Tinjauan Psikologis dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Riant, N. D. (2003). *Gender dalam buku Reinventing Pemberdayaan perempuan ; Menata ulang paradigma pemberdayaan perempuan untuk membangun Indonesia baru dengan Keunggulan Global*, PT. Elex Media Komputindio.
- Salusu, J. (1996). *Pengambilan Keputusan Statistik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Publik*, Grasindo, Jakarta.
- Salusu. (1996). *Suatu Analisis Tentang Proses Pengambilan Keputusan Strategik Pada Tingkat Managemen Eksekutif Puncak, Sebuah Studi Kasus pada Universitas Hasanuddin antara tahun 1974-1982 Unhas*, Ujung Pandang.
- Soedarsono. (1997). *Menuju Ke Penyusunan Mutu Manusia Indonesia Berwawasan Kemitrasejajaran*, Kantor Meneg-PP, Jakarta.
- Soehadi, S. (2003). *Perilaku Organisasional*, Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta.
- Undang-undang Dasar 1945, Pasal 4 dan 27 diterjemahkan dalam TAP MPR Nomor. IV Tahun 2004.
- Undang-undang Nomor. 22 Tahun 2000, tentang Program Pemberdayaan perempuan Nasional.